

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kebijakan Pemerintah Indonesia terkait bidang perdagangan dan perekonomian, hubungan antarnegara dan diplomasi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, perairan Indonesia selalu diutamakan. Dalam beberapa rapat antarkepala negara di tingkat internasional, Presiden Joko Widodo telah memaparkan keinginannya untuk memanfaatkan perairan Indonesia, menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan menyejahterakan rakyat. Perairan Indonesia “dapat memengaruhi keamanan, keselamatan, perekonomian, dan lingkungan hidup, yang akan menjadi kunci dalam menyusun kebijakan kelautan serta menjamin keselamatan perdagangan maritim”<sup>1</sup>. Oleh karena itu, lautan tidak dapat dipungkiri dalam bidang perekonomian, perkembangan, dan keamanan Indonesia. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi di sekitar 5,8% per tahun yang diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Pada tahun 1953, Presiden pertama Indonesia Soekarno mempunyai impian untuk menjadikan Indonesia bangsa pelaut. “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, dan negara damai untuk mengembangkan Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai laut”<sup>2</sup>. Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia “menjelaskan suatu perubahan mendasar dalam struktur kewilayahan Negara Republik Indonesia karena laut tidak lagi dianggap sebagai pemisah pulau-pulau, tetapi pemersatu pulau yang menjadikan keseluruhannya suatu kesatuan yang utuh”<sup>3</sup>. Hal tersebut disampaikan kembali di Konferensi Asia Afrika oleh Presiden Joko Widodo yang mengatakan “kita menyadari

---

<sup>1</sup> Clingan, B. & Wirwille, S., (2010). “Building Global Maritime Security through Global Cooperation”, *RUSI Defence Systems*, Februari 2010, hlm.86.

<sup>2</sup> Presiden Soekarno, (1963). National Maritime Convention.

<sup>3</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, (1960). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia. Jakarta: Indonesia.

pentingnya sektor maritim dan arti strategis Samudra Hindia sebagai jembatan pembangunan ekonomi di Asia dan Afrika”<sup>4</sup> disertai oleh negara-negara yang menggunakan samudra ini.

Poros Maritim Dunia adalah kebijakan baru yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mencapai ekonomi yang maju. Kebijakan ini terdiri dari “langkah-langkah strategis dan implementatif untuk pembangunan Indonesia yang berorientasi pada kelautan dan berbasis laut dalam rangka mewujudkan negara kepulauan yang maju dan mandiri”<sup>5</sup>. Pada tanggal 12 November 2014 pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Naypyitaw, Myanmar, Presiden Joko Widodo mengujarkan “poros maritim dunia akan membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim. Kebijakan ini akan menjadi bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim”<sup>6</sup>. Semua tujuan Poros Maritim Dunia menyinggung pada masalah kekurangan kekuatan militer yang belum memadai dan tidak aman. Potensi lautan Indonesia sebagai sumber daya ekonomi, jalur perdagangan, aspek pokok dalam budaya, dan sejarah Indonesia tidak akan tercapai jika wilayah laut Indonesia tidak diamankan dan dijaga dengan ketat terlebih dahulu. Sebagaimana tertulis dalam Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2008, “wilayah Indonesia yang utuh dan stabil akan menjadi salah satu syarat mutlak terselenggaranya pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat sekaligus mewujudkan stabilitas kawasan-kawasan yang mengitari Indonesia”<sup>7</sup>.

Dalam visi dan misi Presiden Joko Widodo yang diterbitkan pada bulan Mei 2014, poin pertama adalah “mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan”<sup>8</sup>. Kepulauan dimaknai sebagai “suatu gugusan termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah

---

<sup>4</sup> Asian-African Conference Commemorations Indonesia (2015). Pidato Penutupan Y.M. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia pada KTT Asia Afrika 2015. Pidato dan Sambutan. 23 April 2015. Tersedia di: <http://www.aacc2015.id/?p=detspeech&id=4>

<sup>5</sup> Badan Informasi Geospasial. (2014). Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri. Tersedia di: <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/mewujudkan-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia-yang-maju-dan-mandiri>

<sup>6</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2008). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. p.16.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Kalla, J. & Widodo, J., (2014). Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Visi Misi dan Program Aksi. *Jakarta*. Indonesia.

yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian”<sup>9</sup>. Berkaitan dengan hal tersebut, poin keenam bertujuan “mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional”<sup>10</sup>. Hal tersebut tidak dapat diraih apabila Selat Malaka tidak diamankan terlebih dahulu karena “Selat Malaka memang menjadi jalur yang sangat penting di Indonesia”<sup>11</sup>.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur perdagangan yang paling penting dan strategis di dunia. Sebagai perairan terpendek antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, hampir tidak terdapat satu negara pun bebas dari pengaruh Selat Malaka atau aktivitas perdagangan yang melintasinya. Jalur perdagangan ini membawa 45% perdagangan internasional termasuk sumber daya energi dan sumber daya alam dalam jumlah besar. Oleh karena itu, negara di Asia Utara bergantung pada kelancaran kegiatan perdagangan di wilayah ini untuk mempertahankan fungsi ekonomi. Bagi Indonesia, pengamanan Selat Malaka secara langsung merupakan hak kedaulatan bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Namun demikian, “Indonesia mengakui kepentingan para pengguna lainnya yang ingin ikut serta dalam pengamanan wilayah ini secara tidak langsung dalam bentuk pembangunan kapasitas dalam semua bidang”<sup>12</sup>. Terlebih lagi, aktivitas perdagangan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi internasional yang turut didorong oleh Tiongkok dan India, serta didukung oleh Eropa, Afrika, dan Samudra Pasifik. Oleh karena itu, wilayah ini akan menjadi semakin strategis dalam peta geopolitik internasional.

Pemerintahan Jokowi-Kalla telah mengutamakan masalah kedaulatan dan keamanan dalam perkembangan Indonesia dan menganggarkan aset negara dan sumber daya manusia dalam jumlah yang signifikan untuk melengkapi dan membentuk lembaga kekuatan pertahanan nasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling strategis di dunia dalam jalur perdagangan sehingga perubahan dalam kebijakan dan strategi pertahanan Indonesia akan menarik perhatian

---

<sup>9</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia. (1996). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Jakarta: Indonesia. Pasal 1(3)

<sup>10</sup> Kalla, J. & Widodo, J., (2014). Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Visi Misi dan Program Aksi. Jakarta. Indonesia.

<sup>11</sup> Anwar, F., (2015). Wawancara, tatap muka dengan Michael York – 12 Mei 2015, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan, Sentul.

<sup>12</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2008). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. p.16.

dari banyak negara dan membutuhkan banyak kajian yang mendalam dari berbagai sudut pandang untuk menerapkan kebijakan yang tepat.

Pembentukan lembaga aparat keamanan nasional tidak dapat diremehkan atau diabaikan dalam bidang hubungan internasional untuk menghindari kondisi anarki. Menurut Milner 1991, “Anarki adalah sebuah istilah yang digunakan dalam ilmu hubungan internasional untuk menggambarkan sebuah situasi sosial yang mengalami ketidakadaan lembaga atau otoritas yang diakui”<sup>13</sup>. Keamanan nasional menyinggung bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat, kedaulatan, keamanan, dan keselamatan, serta harga diri dan martabat negara. Melalui kebijakan yang mengutamakan pertahanan di dalam perairan Indonesia, Indonesia akan menjadi sebuah negara berkekuatan maritim di wilayah Asia Tenggara dan mempunyai pengaruh di tingkat internasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Tesis ini akan menelaah informasi yang dikumpulkan dari pustaka ilmiah, dokumen kebijakan, kajian dari ahli, dan pengamat dari bidang politik, hubungan antarnegara, dan pertahanan, serta mengkaji hasil wawancara untuk membahas, menjelaskan, dan memberikan keterangan mengenai pertanyaan berikut:

- Mengapa Presiden Joko Widodo memilih untuk memperkuat pertahanan laut di Selat Malaka dalam upaya nasional untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian?

## **C. Kerangka Teoretik**

Penggunaan teori merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian hubungan internasional karena “konsep negara sebagai pihak yang berdaulat adalah sebuah aspek yang penting dalam interaksi antarnegara dan kebiasaan internasional. Melalui penggunaan teori ini, kami mendorong para ahli untuk memerhatikan apa yang diabaikan melalui penggunaan suatu teori tertentu”<sup>14</sup>. Kajian yang dibahas dalam tesis ini akan dikaji menggunakan teori konstruktivisme, sebuah teori yang muncul dan berkembang pada tahun 1990-an. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang sangat terkenal dan sering digunakan dalam kajian hubungan internasional dan politik. Teori

---

<sup>13</sup> Milner, H. 1991. The assumption of anarchy in international relations theory: a critique. *Review of International Studies*, 17: 67–85.

<sup>14</sup> Hurd, I. (2008). *Constructivism*. Chapter 17. Smit Mnidal. Delhi.

‘Aktor Rasional’, salah satu aliran pemikiran dalam konsep besar konstruktivisme akan digunakan untuk mengamati masalah ini dari sudut pandang perekonomian dan pertahanan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Pelaksanaan penelitian membutuhkan kajian ilmiah yang dilandasi teori. Konstruktivisme merupakan salah satu teori yang paling penting dan sering digunakan dalam bidang hubungan internasional sebagaimana disebutkan oleh seorang filsafat yang bernama Immanuel Kant yang mengatakan, “pengetahuan adalah hasil dari akal manusia”. Apabila suatu pihak menciptakan sebuah kondisi tertentu, pihak yang lain akan menyesuaikan reaksinya dengan kondisi tersebut agar tidak dirugikan oleh pihak tersebut. Reaksi yang dilakukan oleh negara juga akan dipengaruhi oleh latar belakang masalah, sumber daya yang tersedia, kepentingan nasional, negara sekutunya, dan faktor lain-lain. Semua faktor tersebut akan menciptakan suatu kondisi kawasan dan kebiasaan dalam hubungan antarnegara. “Kebiasaan internasional merupakan hasil dari perilaku negara dan memengaruhi perilaku negara tersebut”<sup>15</sup>. Dengan demikian, masyarakat internasional dikonstruksi dalam pendekatan konstruktivisme yang menentukan politik antarnegara. Hal tersebut dipaparkan oleh Keliat (2009) yang menambahkan bahwa “konsep keamanan maritim bukanlah suatu konsep yang baku tetapi suatu konsep yang pada tataran internasional sedang dikonstruksikan”<sup>16</sup>. Perubahan dalam kebijakan keamanan berupaya menjaga kestabilan dan keamanan melalui tindakan yang mencerminkan tantangan dan ancaman baru yang dihadapi oleh masyarakat internasional. Berdasarkan teori ini, Indonesia berkehendak mengembangkan kekuatan laut sebagai reaksi terhadap perubahan dalam bidang ekonomi, aktivitas perdagangan internasional, dan kondisi keamanan di sekitarnya.

Kebanyakan produk ilmiah yang mengkaji Selat Malaka dalam sistem perdagangan internasional menggunakan teori konstruktivisme tetapi tesis ini menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam beberapa hal. Pertama, tesis ini akan mengkaji isu keamanan di Selat Malaka dari sudut pandang Indonesia yang berbeda dengan Malaysia dan Singapura. Indonesia merupakan negara terbesar yang berpantai di Selat Malaka dan sebagian besar wilayah Selat Malaka tercakup dalam kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia menanggung biaya tertinggi di antara ketiga

---

<sup>15</sup> Hurd, I. (2008). *Constructivism*. Chapter 17. Smit Mnidal. Delhi.

<sup>16</sup> Keliat, M., (2009). *Keamanan Maritime dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia*. *Journal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.13, No.1 Juli 2009. hal.111-129.

negara pantai dalam pengelolaan dan pengamanan di wilayah tersebut. Meski demikian, Indonesia tidak mendapat keuntungan terbesar di antara ketiga negara tersebut. Akan tetapi, Indonesia dirugikan karena aktivitas perdagangannya yang dikendalikan oleh Singapura sehingga sebagian besar aktivitas perekonomian dan keuntungan tidak didapat oleh Indonesia. Kajian ini bertujuan menyoroti kekurangan dan kelemahan yang menghambat kemampuan Indonesia untuk mendapatkan keuntungan melalui Selat Malaka dan kedudukannya yang strategis dalam ekonomi internasional. Tesis ini berbeda dengan tulisan ilmiah yang lain seperti Meng, Q., Qu, X., (2012) *The Economic Importance of the Straits of Malacca and Singapore: An Extreme Scenario Analysis* yang menyoroti skenario terburuk yang dapat muncul apabila keamanan di Selat Malaka tidak terjaga dengan ketat. Kajian tersebut tidak menyinggung sisi kebijakan atau memberikan rekomendasi tentang cara terbaik untuk menghadapi atau menanggulangi ancaman tersebut melalui perubahan dalam kebijakan pertahanan, keamanan, atau kerjasama. Walaupun tesis ini akan menggarisbawahi dan menggambarkan tantangan yang sedang dihadapi oleh Indonesia di wilayah laut, tesis ini juga akan melanjutkan pembahasan tentang cara untuk mencegah dan menanggulangi ancaman tersebut dalam tulisan ilmiah yang lain.

Kedua, tesis ini bertujuan menggunakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu Poros Maritim Dunia sebagai landasan kajian. Presiden Joko Widodo mengambil alih tugas kepresidenan pada bulan Oktober 2014 tetapi hingga kini belum ada perubahan kebijakan pertahanan yang jelas karena belum sampai pada tahapan penerapan. Oleh karena itu, kebanyakan kajian ilmiah menggunakan kebijakan yang lama atau sudut pandang negara lain. Pembahasan dalam tesis ini bertujuan mendiskusikan hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan dan penerapan kebijakan di masa depan berdasarkan pengumuman yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan kajian ilmiah yang lain karena jarang mempertimbangkan perubahan dalam kebijakan Presiden Joko Widodo atau perubahan dalam situasi politik di Selat Malaka dan perairan di sekitarnya.

Ketiga, tesis ini berbeda dengan kajian ilmiah yang lain karena penelitian ini bertujuan menyoroti keterkaitan antara bidang perekonomian, keamanan, pertahanan, perumusan kebijakan, politik di wilayah Asia dan Asia Tenggara, dan menyinggung pada beberapa faktor yang lain. Biasanya kajian ilmiah hanya akan fokus pada satu bidang dan tidak menghubungkan dengan yang lain. Dengan demikian, penjelasan hubungan antara bidang-bidang tersebut sangat penting karena

dalam dunia nyata, hal perekonomian tidak dapat dilepaskan dari bidang keamanan, pertahanan, politik, perdagangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kajian yang memberikan rekomendasi tentang perkembangan tersebut harus memadukan dan mempertimbangkan semua faktor secara menyeluruh.

Landasan dari teori konstruktivisme menjelaskan bahwa konsep yang memaknai atau menerangkan suatu fenomena tertentu dapat berubah dan bergeser sesuai dengan kondisi politik, keamanan, dan ekonomi internasional. Kedua, semua hal yang dilakukan dalam ilmu hubungan internasional adalah penafsiran yang diciptakan oleh seseorang atau sekelompok kecil orang sesuai dengan pengetahuan, pemahaman, dan latar belakang mereka sendiri<sup>17</sup>. Kedua konsep tersebut menyinggung pada kedaulatan dan kewajiban yang dipegang oleh pihak-pihak tertentu yang dianggap berwenang, yaitu negara. Fenomena ini pernah berubah dan menyesuaikan kemajuan dalam sistem internasional, termasuk munculnya hukum internasional, ketertiban dan tata kelola internasional, kewajiban nasional, dan hak asasi manusia. Cara untuk menentukan kedaulatan negara di wilayah laut diterangkan lebih lanjut dalam pembahasan tentang hukum laut dan Doktrin Djuanda pada Bab II. Hal tersebut memungkinkan masyarakat internasional menerapkan konsep kedaulatan pada wilayah lautan yang secara fisik tidak dapat dimiliki atau dihuni oleh manusia. “Konsep yang diterima dalam ketertiban masyarakat internasional, bukan hanya tertanam dalam otak individu, melainkan terukir dalam ingatan sosial, sejarah, proses pemerintahan, sistem pendidikan, dan ketertiban masyarakat”<sup>18</sup>, faktor-faktor yang mempersulit proses penguatan hubungan antarnegara.

Dalam tesis ini, peneliti menggagas peningkatan nilai perdagangan di Selat Malaka akan mengakibatkan peningkatan risiko terhadap kapal niaga yang lewat. Masalah keamanan jarang dibahas dalam penelitian tentang sisi perekonomian di Selat Malaka tetapi peningkatan risiko kejahatan dapat berimbas negatif pada ekonomi, harga jual beli barang, daya saing ekonomi Indonesia, stabilitas wilayah, dan sebagainya. Oleh karena itu, faktor wilayah termasuk peningkatan nilai perdagangan di laut dan ancaman terhadap keamanan harus mengakibatkan peninjauan ulang terhadap kebijakan keamanan laut di Indonesia. Perubahan dalam kebijakan keamanan di laut Indonesia akan memicu reaksi dari negara tetangga tetapi sebagaimana dikatakan

---

<sup>17</sup> Mohtar, M. (2015). Wawancara bicara. FISIPOL UGM. Cara berpolitik luar negeri Indonesia. Bebas dan Aktif

<sup>18</sup> Palan, R. 2000. A world of their making: an evaluation of the constructivist critique in International Relations. *Review of International Studies*, 26: 575–98.

oleh Wendt (1999), “konstruktivisme membuka peluang untuk mengubah hubungan sosial antarnegara sehingga dapat mengubah sistem anarki menjadi sistem yang lebih teratur”<sup>19</sup>. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam situasi global berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan ketegangan antarnegara. Akan tetapi, melalui peluang ekonomi, kondisi yang pantas untuk menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan akan terbentuk dan diikuti oleh kerjasama yang lebih erat dalam bidang keamanan dan pertahanan.

Sejak teori ini muncul, mulai beredar, dan diakui oleh masyarakat ahli politik internasional, teori ini telah menjadi salah satu aliran pemikiran yang paling terkemuka dan sering digunakan untuk meninjau dan menelaah interaksi antarnegara. Misalnya, perubahan terhadap kebijakan di satu negara tertentu cenderung diikuti oleh perubahan dalam kebijakan terkait oleh negara tetangga yang ingin memanfaatkan kondisi baru yang diciptakan oleh perubahan dalam kebijakan di negara pertama. Keputusan yang diambil oleh suatu negara tidak dilaksanakan tanpa pemicu, tujuan, proses perencanaan, dan akibat yang terbelit dalam persepsi, konteks politik, ekonomi, dan masyarakat. Menurut Wendt, seorang pemikir terkemuka dalam bidang hubungan internasional, inti dari teori konstruktivisme adalah “kenyataan internasional dibangun atau diciptakan oleh faktor sosial di sekitarnya. Hal tersebut berdampak pada konsep anarki, adanya pemicu, dan proses untuk menentukan kepentingan nasional”<sup>20</sup>. Terlebih lagi, “suatu pihak dalam masyarakat internasional akan menganggap atau menyambut suatu aktor tertentu sesuai dengan makna yang dibawa oleh aktor tersebut”<sup>21</sup>. Misalnya, jika terdapat suatu pihak yang dianggap sebagai musuh, pihak tersebut akan disambut sebagai ancaman. “Di dunia ini yang dikonstruksi oleh keberadaan pola, sebab, dan akibat, serta pengakuan terhadap konsep negara yang bergantung pada konstruksi yang dibangun dan dimaknai oleh manusia sendiri”<sup>22</sup>. Gagasan tersebut akan mendasari pembahasan teori dalam tesis ini.

Teori ini ditunjukkan dalam sebuah laporan pertahanan nasional yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Laporan tersebut mengatakan, “pemahaman terhadap makna dan substansi yang terkandung di dalamnya akan bervariasi tergantung kepada tata nilai, persepsi,

---

<sup>19</sup> Wendt, A., (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>20</sup> Hurd, I. (2008). *Constructivism*. Chapter 17. Smit Mnidal. Delhi.

<sup>21</sup> Kratochwil, F. V. 1989. *Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs*. Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>22</sup> Ibid

dan kepentingan”<sup>23</sup>. Jika kita melacak masalah ini lebih jauh, pola pembuatan keputusan berdasarkan kebijakan yang mendahuluinya dapat memunculkan persaingan antarnegara yang lebih cenderung pada kerangka teori realisme.

Negara-negara ASEAN telah bersepakat untuk menghindari persaingan tersebut. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, ASEAN berkomitmen untuk menghindari permusuhan dan konflik terbuka atau ketegangan yang berlebihan. Kerjasama dan konsultasi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan akan membantu mempertahankan kestabilan wilayah dan membina kondisi yang aman. Situasi tersebut mencerminkan teori liberalisme yang mengusulkan “perdagangan bebas merupakan cara yang jauh lebih efektif dan damai untuk mencapai kemakmuran negara”<sup>24</sup>. Oleh karena itu, teori konstruktivisme menjembatani realisme dan liberalisme.

Aliran pemikiran liberalisme juga tidak mencerminkan situasi di wilayah Asia Tenggara dengan tepat dan secara menyeluruh. Dalam kebanyakan kasus, negara bekerjasama untuk saling menguntungkan, padahal dalam situasi tertentu negara akan bertindak sepihak untuk melindungi kepentingannya sendiri. Kemampuan untuk bertindak sepihak biasanya bergantung pada kekuatan dalam tolok ukur yang tradisional yaitu kekuatan ekonomi dan militer yang bersifat realisme. Oleh karena itu, kebanyakan ahli dalam bidang hubungan internasional merujuk pada konstruktivisme untuk menelusuri faktor-faktor dan situasi politik yang melatarbelakangi suatu kebijakan atau keputusan tertentu.

Walaupun konstruktivisme merupakan teori yang paling tepat, kami tetap harus bertindak dengan kewaspadaan karena teori ini juga mempunyai kekurangan. Seorang ahli hubungan internasional dari Universitas Pertahanan Nasional mengingatkan kita kembali bahwa penggunaan teori konstruktivisme dapat membendung pemikiran kita karena kita selalu merujuk pada sejarah untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. “Konstruktivisme berfokus pada penjelasan yang menyoroti penyebab di balik suatu peristiwa. Di lain pihak, penggunaan teori ini mengaburkan dan membatasi kemampuan kita untuk menciptakan konsep baru dalam politik

---

<sup>23</sup>Darmono, B., (2010). Keamanan Nasional, Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan. Pemerintah Indonesia. Jakarta.

<sup>24</sup> Burchill, S., Linklater, A., (2009). Teori-Teori Hubungan Internasional. pp. 46-47. Nusa Media: Bandung.

internasional”<sup>25</sup>. Presiden Joko Widodo berencana “membongkar pemikiran lama tentang keamanan”<sup>26</sup> dan memberikan harapan baru kepada politik dan Pemerintah Indonesia. Hal tersebut dianggap sangat penting dalam membangun kekuatan militer yang efektif dan menggantikan pola pikir pertahanan yang ketinggalan zaman”<sup>27</sup>. Perubahan tersebut sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan pada masa yang semakin dinamis.

Walaupun keadaan sosial, politik, dan ekonomi dilandasi oleh peristiwa yang bersejarah, politik internasional, hubungan antarnegara, serta kekuatan ekonomi dan militer sangat labil dan berubah dengan cepat. Dengan pola pikir tersebut, Presiden Jokowi akan mencoba menyusun aparat keamanan yang sesuai dengan masa kini dan siap untuk menempuh tantangan pada masa depan. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa sejarah tidak menghambat kemampuan kita untuk mengkaji dan memahami fenomena baru. Tesis ini akan menghindari masalah tersebut melalui penggunaan dokumen kebijakan baru yang dirancangan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, penelitian ini akan mencakup informasi dari lembaga dalam dan luar negeri yang menelaah perubahan dalam bidang perekonomian, politik, keamanan, dan militer. Penggunaan kedua jenis informasi bertujuan memastikan penelitian ini tidak berpihak atau menjadi terhambat dalam batasan konstruktivisme. Penelitian ini akan merujuk pada fenomena yang bersejarah untuk memperkuat latar belakang dan konteks yang mengawali suatu fenomena baru serta menghubungkan konteks sejarah Indonesia dengan kemajuan dalam perkembangan nasional pada masa kini.

Sebagaimana dituliskan dalam buku *Constructivism in International Relations: The Politics of Reality* yang disusun oleh Maja Zehfuss, pemilihan kata juga merupakan salah satu faktor pokok dalam teori konstruktivisme. Buku tersebut mengatakan “kami harus membedakan kata dengan dunia nyata. Kata-kata yang kita pilih untuk memaparkan suatu fenomena sosial atau peristiwa

---

<sup>25</sup> Marsetio, (2013). Membangun *Maritime Domain Awareness* Guna Mendukung Keamanan Maritim dalam Perspektif TNI Angkatan Laut. *Jurnal Pertahanan Desember 2013*, Volume 3, Nomor 3. Universitas Pertahanan Indonesia.

<sup>26</sup> Liow, C. & Shekhar, V., (2014). Indonesia as a Maritime Power: Jokowi's Vision, Strategies, and Obstacles Ahead. Bookings Institute. Tersedia di <http://www.brookings.edu/research/articles/2014/11/indonesia-maritime-liow-shekhar>

<sup>27</sup> Ibid.

bersejarah yang memengaruhi persepsi internasional terhadap isu tersebut dan penyelesaian yang akan dicapai karena kata-kata dapat mewujudkan persepsi tentang dunia ini”<sup>28</sup>.

Pengaruh sejarah Indonesia dalam politik modern juga dapat dilihat dengan jelas. Pada awal jabatan Presiden SBY, musuh Republik Indonesia masih datang lewat darat dalam bentuk pemberontak di Ambon, Aceh, Papua, dan Sulawesi. Pada masa lalu, kekuatan militer Indonesia perlu dilengkapi dan diperalati untuk menghadapi peperangan di darat dengan kelompok pemberontak. Pada saat itu, pelanggaran terhadap perairan dan keutuhan wilayah Indonesia kurang diperhatikan. Kini, kebanyakan gerakan pemberontak dalam negeri telah diamankan atau didamaikan sehingga ancaman terbesar terhadap kedaulatan Indonesia berasal dari luar negeri dan datang melalui laut dalam bentuk “konflik militer terbatas di perairan”<sup>29</sup>. Oleh karena itu, sikap Indonesia terhadap pertahanan harus ikut bergeser untuk menanggulangi ancaman baru di laut secara efektif, dengan segera, dan berdasarkan kajian dan informasi yang kekinian.

Indonesia telah menghadapi kesulitan dalam upaya mengubah pola pikir nasional karena pembahasan tentang kenyataan internasional selalu cerundung pada konsep ketertiban masyarakat yang sedang berlaku. Biasanya lapisan elite menentukan kenyataan yang kita saksikan setiap hari baik melalui media, sejarah, sistem perekonomian, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor di luar kendali kita<sup>30</sup>. Sumber informasi tersebut mewujudkan lingkungan di sekitar kita dan berimbas pada kesan dan persepsi kita terhadap fenomena sosial.

Selain itu, Zehfuss (2002) mengingatkan kita kembali bahwa, untuk mengkaji dan menelaah suatu fenomena tertentu, baik dalam bidang hubungan internasional maupun bidang lainnya, para ahli harus berangkat dari satu titik awal yang ditentukan terlebih dahulu<sup>31</sup>. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa keputusan yang diambil dalam penentuan titik awal tersebut telah dipengaruhi oleh konteks politik yang mengawalinya. Oleh karena itu, pilihan metodologi bukan bebas dari prasangka dan pengaruh politik, melainkan tertanam dengan kuat dalam sejarah, budaya, kepentingan politik dan faktor lainnya yang memengaruhi masyarakat, ekonomi, dan politik dalam

---

<sup>28</sup> Zehfuss, M., (2002). *Constructivism in International Relations: The Politics of Reality*. Cambridge University Press. Cambridge University.

<sup>29</sup> Nainggolan, P.P, (2013). *Keamanan Maritim di Kawasan*. Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI). Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: Indonesia.

<sup>30</sup> Zehfuss, M. (2002). *Constructivism in International Relations: The Politics of Reality*. Cambridge University Press. Cambridge University.

<sup>31</sup> Ibid.

dan luar negeri. Terlebih lagi, konstruktivisme menolak gagasan yang menyamaratakan umat manusia, bahkan mengatakan bahwa individu dan kelompok dapat memegang pendapat sendiri, berdasarkan apa yang diketahui oleh masyarakat dalam kondisi di sekitarnya. Keanekaragaman budaya, sistem politik, dan sejarah akan memunculkan perbedaan dalam pengkajian politik dan sudut pandang.

Teori tersebut sangat tepat untuk mengkaji politik Indonesia, kepentingan nasional, dan perubahan dalam prioritas negara. Penjelmaan politik dan ekonomi di Indonesia dalam dasawarsa terakhir sangat mengesankan, tetapi sejarah Indonesia masih berpengaruh besar dalam cara berpolitik dan isu yang dihadapi dalam perbincangan politik pada masa kini. Presiden Joko Widodo “tidak menampik bahwa inspirasinya muncul dari ide-ide besar Bung Karno bahwa di laut kita jaya”<sup>32</sup>. Terlebih lagi, politik dalam negeri, sikap Indonesia terhadap fenomena globalisasi, dan ketertarikan internasional pada ekonomi Indonesia sangat terpengaruh oleh identitas nasional dan perspektif kesejarahan yang mewaspadaikan dan mencurigai pihak asing yang mungkin mempunyai niat yang kurang baik terhadap Indonesia dan kepentingannya. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo harus merumuskan kebijakan keamanan dan pertahanan dengan sangat teliti yang menduduki titik tengah antara aspirasi nasionalisme di Indonesia dan kebutuhannya untuk turut bekerjasama dengan negara lain.

#### **E. Model Teori – Aktor Rasional (“*Rational Actor*”)**

Teori yang disebut “Aktor Rasional” sering muncul dalam kajian ilmiah konstruktivisme. Menurut MacDonald (2003), dugaan yang digunakan dalam teori ini sangat sederhana dan masuk akal sehingga dapat diterima dalam banyak bidang ilmiah. Teori Aktor Rasional berasal dari teori *Expected Utility Theory* (Teori Keuntungan yang Diharapkan) yang dirumuskan oleh Von Neumann dan Morgenstern pada tahun 1940-an mengenai pembuatan keputusan.

Teori ini menyoroti tiga hal utama yaitu, “*organisational process model*”, “*Layman’s view*”, dan “aktor rasional”. *Organisations Process Model* membahas cara untuk membuat keputusan sebagai kelompok dan masalah “*group think*”. “*Group think*” yang mengatakan bahwa, pembuat keputusan, walaupun sangat terdidik dan berpengalaman banyak cenderung membuat kesalahan besar dalam pembuatan keputusan karena mereka tidak bersedia untuk menentang atau

---

<sup>32</sup> Urip, M., (2014). Perlu Dukungan Politik dan Anggaran Wujudkan Poros Maritim Dunia. DPR Komisariat I. Parlemen Majalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Edisi 119 TH. XLIV, 2014

mempertanyakan pemikiran atau penafsiran yang telah diterima pada umumnya<sup>33</sup>. Menurut teori ini, bukti yang kuat akan disisihkan apabila tidak sejalan dengan persepsi pada umumnya, sedangkan bukti yang lemah akan diterima sebagai landasan kata apabila menunjang dan memajukan pola pikir yang dianut oleh kelompok.

“*Layman’s view*” berangkat dari *the Governmental or Beuracratic Politics Model*. Menurut teori ini, ketika orang bergabung dengan sebuah organisasi atau sebuah organisasi kecil digabungkan dengan sebuah organisasi besar, terdapat politik yang muncul sebagai akibat dari interaksi antara kedua pihak sehingga menimbulkan persaingan antarpihak yang seharusnya bekerjasama. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidaksetaraan, perselisihan, dan ketidaksetujuan sehingga hubungan kerjasama tidak dapat dijalin dengan baik. Dalam situasi tersebut, terkadang kebijakan yang dirumuskan lebih mengandung kepentingan dari pihak politik tertentu, bukan kepentingan rakyat secara menyeluruh<sup>34</sup>. Oleh karena itu, pendekatan ‘aktor rasional’ harus diperhatikan dalam kajian ini.

Teori ini biasanya digunakan untuk menelaah masalah makroekonomi. Dalam teori tersebut, para pembuat kebijakan akan mengemukakan semua pilihan dan akibatnya dalam situasi tertentu untuk menjalankan pilihan yang memaksimalkan keuntungan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Para pembuat keputusan akan mengambil tindakan yang sesuai dengan kajian yang memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang mungkin akan didapatkan dari suatu kebijakan tertentu. Pendekatan ini bertumpang tindih dengan teori liberalisme yang juga digunakan dalam konteks pengkajian hal perekonomian. “Neoliberalisme dalam hal perekonomian merupakan konsekuensi logis dari sistem politik demokrasi yang dianut di Indonesia”<sup>35</sup> sehingga sistem kapitalisme yang dipimpin oleh negara kuat dan maju dapat mengelabui negara berkembang dan miskin.

Pada tahun 1993, Greg Cashman menyusun serangkaian tahapan yang membentuk modal rasional. Tahapan pertama adalah mengutarakan masalah yang perlu diteliti. Dengan pemahaman yang mendalam, masalah-masalah yang dihadapi dapat diurutkan berdasarkan tingkat urgensinya.

---

<sup>33</sup> Janis, I.L., (1972). *Victims of Groupthink*. Houghton, Mifflin Company, Boston 1972.

<sup>34</sup> Allison, G. (1971). *Essence of Decision Making: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Little Brown and Company, Boston, 1971.

<sup>35</sup> Hendropriyono, A.M., (2013). *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*. Kompas Penerbit Buku, Jakarta, Indonesia.

Menurut tahapan kedua dalam teori ini, pemimpin akan mendahuluhkan masalah yang dianggap mendesak dalam pencapaian tujuan dan kepentingan nasional. Dalam tahapan ketiga, teori ini berkaitan dengan konstruktivisme karena menurut modal “aktor rasional”, pengumpulan informasi perlu dijalankan secara terus-menerus untuk memastikan keputusan dapat dilatarbelakangi oleh informasi yang terbaru. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh suatu negara akan dilandasi oleh kajian terhadap serangkaian peristiwa yang mengawalinya. Tahapan keempat adalah mengutarakan pilihan lainnya yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sesuai dengan konstruktivisme, teori “aktor rasional” akan menentukan dan menindaklanjuti pilihan terbaik yang sesuai dengan kondisi saat pembuatan keputusan. Tahapan keenam menjelaskan bahwa dalam politik internasional, pihak tertentu akan mengambil pilihan yang dapat meningkatkan keuntungan yang akan didapatkan dan mengurangi kerugian yang mungkin akan dialami. Hal tersebut berimbas pada penerapan keputusan dan pada akhirnya akan dinilai dalam tahapan pengawasan yang perlu dilakukan dalam proses pembuatan keputusan selanjutnya.

Keterkaitan antara modal ‘aktor rasional’ dan teori konstruktivisme dapat dilihat dengan sangat jelas. Dalam proses pembuatan keputusan, kedua kerangka pemikiran bergantung pada keputusan yang telah diambil sebelumnya. Cara pembuatan keputusan akan didiskusikan secara lebih lanjut dalam Bab II bagian pengkajian kepentingan nasional Indonesia.

## **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menghasilkan sebuah kajian ilmiah yang melacak dan menelaah perubahan dalam kebijakan pertahanan Indonesia dan hubungannya dengan kebijakan perekonomian sebagaimana dikedepankan dalam kebijakan Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Sebagaimana ditunjukkan dalam buku Putih Pertahanan Nasional, “Indonesia sedang menjalani era globalisasi dan perkembangan konteks strategis yang mudah berubah. Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional dan tak dapat mengelak tuntutan perubahan ini”<sup>36</sup>. Sebagai salah satu hal yang paling pokok dalam perkembangan nasional, Indonesia harus melaksanakan penelitian yang sangat mendalam di berbagai bidang.

Kajian ini akan menyoroti dua hal utama yaitu:

---

<sup>36</sup> Departemen Pertahanan, (2008). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia.

- 1) Indonesia sebagai negara yang semakin penting dan berpengaruh dalam masyarakat internasional. Penerapan konsep Poros Maritim Dunia di Selat Malaka untuk menjaga kestabilan dan keamanan untuk melanjutkan dan memajukan perkembangan di Indonesia serta menghubungkan Indonesia dengan ekonomi internasional.
- 2) Kekuatan Indonesia di bidang maritim diharapkan terus meningkat dan bekerja dengan giat secara timbal balik dengan negara lain. Kerjasama ini akan dapat memberantas kejahatan di lautan dan mengamankan Selat Malaka dari ancaman yang berpotensi mengganggu atau mengusik perdagangan internasional.

Melalui hal tersebut, penelitian ini berencana membuat kontribusi sebagai berikut:

- 1) Memaparkan kepentingan Indonesia di wilayah Selat Malaka supaya pembaca lebih memahami wilayah ini dari segi strategi geopolitik, pertahanan, dan perekonomian.
- 2) Mendiskusikan rencana Indonesia untuk memperoleh aset militer yang mencukupi kebutuhan Indonesia untuk melindungi Selat Malaka dan membahas pola penempatan aset kekuatan militer secara efektif.
- 3) Menyoroti hubungan kerjasama yang sangat penting dalam rencana Indonesia untuk menciptakan keadaan yang aman dan stabil di perairannya dan disekitarnya.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P. Marsudi mengumumkan inti dari prioritas tersebut adalah keamanan dalam perairan Indonesia sangat diperlukan untuk menarik perdagangan, aktivitas perekonomian, mencapai kestabilan, dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Pemaduan antara kebijakan perekonomian, kebijakan luar negeri, dan kebijakan pertahanan diharuskan dapat mencapai situasi yang menguntungkan bagi kepentingan Indonesia.

### **G. Hipotesis**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik hipotesis bahwa Presiden Joko Widodo memilih untuk memperkuat pertahanan laut di Selat Malaka dalam upaya nasional untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian karena dua faktor utama yaitu:

- 1) Memanfaatkan kedudukan Indonesia yang sangat strategis dalam aktivitas perekonomian dan perdagangan internasional yang dapat menyejahterakan rakyat, meningkatkan daya saing, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menaikkan penghasilan negara.
- 2) Menentukan posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah dalam masyarakat Internasional.

## H. Metodologi

Tesis ini akan menggunakan beberapa metode penelitian untuk memperkaya hasil kajian, mempertimbangkan pendekatan dari berbagai pihak untuk menarik kesimpulan yang tepat dalam konteks Asia Tenggara, menyajikan kajian yang relevan dalam perumusan kebijakan pada masa kini, dan bermutu sebagai hasil penelitian ilmiah. Tesis ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

- 1) Wawancara – Berbicara langsung kepada pihak yang berkeahlian dalam bidang terkait.
- 2) Kajian Undang-Undang – Menelaah undang-undang yang terkait dan membahas dampaknya terhadap keamanan atau aktivitas perdagangan di Selat Malaka.
- 3) Tinjauan Pustaka – Menggunakan informasi dan penelitian dari berbagai jenis sumber termasuk jurnal dan buku. Hal tersebut sangat penting dalam membangun landasan teori.
- 4) Teks Ahli – Menggunakan informasi dari sumber yang ternama dalam bidang politik dan pertahanan. Teks ahli mencakup kajian politik dari lembaga politik, laporan dari pihak asing termasuk lembaga internasional dsb.
- 5) Teks Pemerintahan – Menggunakan teks dan dokumen kebijakan, siaran pers dan informasi lainnya yang dikeluarkan oleh kementerian atau cabang pemerintahan. Penelitian ini juga akan menggunakan dokumen kebijakan dan perencanaan dari pemerintahan asing.

Penelitian ini akan menggunakan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kebanyakan kajian cenderung pada ilmu kualitatif karena ilmu hubungan internasional merupakan ilmu sosial yang bertujuan mencermati hubungan dan interaksi antarnegara, antarbudaya, dan antarekonomi. Ilmu hubungan internasional meneliti dan menafsirkan perubahan dalam hubungan antarnegara berdasarkan faktor tertentu dan biasanya berhubungan erat dengan bidang perekonomian, perdagangan, pertahanan, dan keamanan.

Penelitian ini juga akan menggunakan statistik, dan informasi dalam bentuk angka. Statistik yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka akan digunakan untuk menyanggah kajian yang bersifat kualitatif. Penggunaan dua jenis penelitian tersebut saling melengkapi dan menerangkan masalah ini secara menyeluruh.

## I. Sistematika Penulisan

- **Bab I: Pendahuluan**– Menjelaskan proposal tesis, masalah yang akan diteliti, latar belakang dan pentingnya, tujuan penelitian, teori, metod penelitian dan sistematika penulisan
- **Bab II: Kepentingan Nasional Indonesia** – Memaparkan kepentingan Indonesia dalam ekonomi dan masyarakat internasional, pentingnya Selat Malaka dan nilai perekonomian, dan keharusan Indonesia untuk memperkuat Angkatan Lautnya di wilayah tersebut.
- **Bab III: Kedudukan Selat Malaka dalam Politik dan Ekonomi Internasional** – Mengkaji kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan negara lainnya untuk melindungi Selat Malaka dan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menyebarluaskan kepentingan nasional di wilayah Asia Tenggara, Asia Utara, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menelaah peningkatan dalam kepentingan nasional dan internasional serta ancaman terhadap Selat Malaka. Membahas kebijakan lama Indonesia terkait dengan keamanan laut dan Selat Malaka.
- **Bab IV: Kebijakan Pertahanan Indonesia di Selat Malaka** – Membahas kebijakan keamanan yang akan diterapkan di wilayah Selat Malaka di masa depan untuk mengamankan ancaman yang akan muncul sebagai akibat dari perubahan dalam hal perekonomian dan keamanan
- **Bab V: Kesimpulan dan Penutup** – Menyajikan saran yang akan membantu pengkaji lainya untuk memahami masalah ini secara lebih mendalam.